SINERGITAS INTER INSTITUSI : PROTOTYPE PENGELOLAAN ZAKAT BAGI MUSTAHIQ BERKATEGORI UMKM

Molly Mustikasari^{1a}, Yudi Haryadi^{2b}, Dadang Mulyana^{3c}

¹²³Universitas Muhammadiyah Bandung

^amollyzulfi@yahoo.co.uk ^byudiharyadi@staim-bandung.ac.id ^cdadangmulyana@staim-bandung.ac.id

Abstract

Poverty is still a problem in all countries, including Indonesia. Various efforts have been made by the government to minimize the amount of poverty from various aspects. In fact, various efforts have been made by a number of ministries, not only the Ministry of Social Affairs. All of them have the same goal, namely reducing poverty. This study aims to produce a zakat management prototype that suits the needs of mustahiq and to produce mustahiq who have entrepreneurial mentality, so that they can become independent mustahiq and become muzakki. The method used in this research is qualitative research methods, the data produced is descriptive data obtained from various kinds of literature related to the research theme. The results of the study obtained a zakat management prototype that is synergized between institutions in empowering mustahiq through MSMEs. Integrative and comprehensive steps in the application of the prototype include screening, training, business assistance and monitoring. The four aspects are carried out sequentially and continuously and in the corridor of synergy between BAZNAS and the Director General of PAUDNI and DIKMAS. By not ignoring basic needs and business capital needs, the output generated from the zakat management prototype can make a mustahiq who can be empowered through MSMEs.

Keywords: Mustahiq, Muzakki, Life Skills Education, MSMEs, Zakat

Abstrak

Kemiskinan masih merupakan problem di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi jumlah kemiskinan tersebut dari berbagai aspek. Bahkan berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah kementerian, tidak hanya Kementerian Sosial. Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu mereduksi angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah *prototype* pengelolaan zakat yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq serta menghasilkan *mustahiq* yang memiliki mental berwirausaha, sehingga mampu menjadi *mustahiq* yang mandiri dan menjadi *muzakki*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil kajian diperoleh sebuah *prototype* pengelolaan zakat yang bersinergi inter institusi dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui UMKM. Langkah-langkah yang integratif dan komprehensif dalam aplikasi *prototype* tersebut yakni dengan melakukan *screening*, *training*, *business assistance* dan *monitoring*. Keempat aspek itu dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan serta dalam koridor sinergitas antara BAZNAS dan Dirjen PAUDNI dan DIKMAS. Dengan tidak mengabaikan kebutuhan pokok dan kebutuhan modal usaha, *output* yang dihasilkan dari *prototype* pengelolaan zakat tersebut dapat menjadikan seorang *mustahiq* yang dapat diberdayakan melalui UMKM.

Kata kunci: Mustahiq, Muzakki, Pendidikan Kecakapan Hidup, UMKM, Zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih merupakan problem di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Walaupun terjadi penurunan namun sampai saat ini keberadaanya masih ada di muka bumi ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalisir jumlah kemiskinan tersebut dari berbagai aspek. Bahkan berbagai upaya dilakukan oleh sejumlah kementerian, tidak hanya Kementerian Sosial. Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu mereduksi angka kemiskinan. Ketidakberdayaan dalam olah sumber daya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan problematika sosial, seperti: kemiskinan dan segala keterbatasan akses untuk menjadi 'sejahtera'¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa tercatat 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang. Bila dibandingkan dengan data bulan Maret 2019 angka kemiskinan tercatat sebesar 25,24 juta orang, dapat dilihat prosentasi penurunannya sebesar 0,19%. Mengalami penurunan, tetapi angka tersebut menurun belum signifikan.²

Memperhatikan misi United Nation (UN) dalam *Sustanaibility Development Goals (SDGs)*, bahwa tujuan pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam berbagai bentuknya dimana saja ("*end poverty in all its forms everywhere*"). Melihat tujuan itu, bila masih ada catatan prosentasi jumlah kemiskinan, artinya *goal SDGs* masih belum terealisasi. Namun targetnya di tahun 2030, UN ini akan melakukan pembasmian kemiskinan secara *extreem* untuk semua orang di mana saja, saat ini hasil pengukuran versi UN masih ada orang yang hidup dengan kurang dari \$ 1,25 sehari³ .

Islam memiliki bermacam-macam prinsip terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan publik untuk dijadikan panduan bagi program pengurangan kemiskinan, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen filantropi yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengingat, zakat dapat memberikan efek luas (*multiplier effect*)⁴ , dan menyentuh berbagai aspek kehidupan terutama bila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif.

Pendistribusian zakat yang tidak sesuai sasaran akan membuat penerima zakat (*mustahiq*) menjadi ketergantungan dan malas dan tidak merubah kondisi *mustahiq*. Padahal tujuan pemberian zakat selain memberikan bantuan biaya hidup juga untuk mengeluarkan *mustahiq* dari jeratan kemiskinan⁵ . Tidak menjadikan *mustahiq* berada di zona nyaman, mengingat tidak sedikit yang harus dibantu. *Mustahiq* yang masih memungkinkan untuk dimotivasi melakukan perubahan, diedukasi untuk berubah sehingga memiliki kemampuan untuk memposisikan dirinya menjadi pemberi bantuan berupa zakat (*muzakki*).

Tentunya yang menjadi penyebab ketergantungan, malas berusaha, tidak merubah kondisi bagi *mustahiq* diakibatkan oleh berbagai hal. Ditunjukkan oleh beberapa hasil penelitian berikut. Peneliti Wulansari menyatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program

“Senyum Mandiri”, karena terdapat di beberapa *mustahiq* yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan.⁶ Sehingga sasaran utama dari distribusi zakat yang dicanangkan menjadi tidak tepat sasaran mengingat adanya *mustahiq* yang tidak menggunakan peruntukkan zakat secara proporsional.

-Menurut penelitian yang dilakukan Fitriani W.F., dan Priantina A., diantara permasalahan internal BAZNAS/LAZ dalam menyelenggarakan program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif, adalah: belum matangnya perencanaan program, SDM pendamping yang handal masih kurang, alat ukur keberhasilan program tidak ada. Adapun permasalahan dari eksternal BAZNAS/LAZ adalah: penataan sistematis kelembagaan BAZNAS/LAZ masih lemah, jiwa kewirausahaan *mustahiq* masih rendah, serta *mustahiq* tidak mengetahui aturan program zakat produktif.⁷

Pendistribusian zakat yang tepat, melalui *prototype* yang ditawarkan berupa pendistribusian zakat produktif bersamaan dengan zakat konsumtif sejalan dengan pernyataan Yusuf Qardhawi bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Menyelesaikan permasalahan dengan mengeliminasi penyebabnya akan menjadi sebuah penyelesaian yang komprehensif dan mengakar, tidak hanya memadamkan api dipermukaan tetapi memadamkan sumber api, yang bila dibiarkan akan melalap semua yang ada secara perlahan dan pasti.⁸

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1) bagaimana *prototype* distribusi zakat yang dibutuhkan *mustahiq* berkategori UMKM?, 2) apakah hasil luaran yang diharapkan dari *prototype* distribusi zakat tersebut?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menghasilkan sebuah *prototype* distribusi zakat yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* berkategori UMKM dan 2) menghasilkan *mustahiq* yang memiliki mental berwirausaha, sehingga mampu menjadi *mustahiq* yang mandiri dan bisa mengalami perubahan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan alternatif lain dalam mengelola zakat untuk *mustahiq* melalui *prototype* yang dirancang sesuai kebutuhan *mustahiq*, sehingga tidak hanya mengeliminasi tingkat kemiskinan namun juga mereduksi akar permasalahan yang dapat memberikan dampak lain yakni merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

TINJAUAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori Talcot Parsons sebagai kajian Sosiologi. Ada empat fungsi penting untuk sistem “tindakan”, disebut dengan skema AGIL. Menurut Racher AGIL adalah suatu fungsi (*function*) kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parson menyatakan bahwa ada empat fungsi

penting diperlukan semua sistem *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *integration* (I) dan *latency* (L) ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan, suatu sistem harus memiliki empat fungsi ini:

1. *Adaptation* (Adaptasi); sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (Pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integration* (Integrasi): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya.
4. *Latency* (Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Empat sistem tindakan itu tidak muncul dalam kehidupan nyata, keempat itu lebih merupakan peralatan analisis untuk menganalisis kehidupan nyata.⁹

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, ke empat aspek tersebut harus menjadi bagian yang saling berhubungan. Sebuah pengelolaan yang adaptif terhadap berbagai permasalahan pengelolaan zakat. Memiliki tujuan akhir yang jelas, dimana antar bagian pelaksanaannya saling berhubungan serta mampu memelihara *prototype* pengelolaan zakat dengan selalu berpijak pada tujuan akhir dari *prototype* yang telah dibentuk tersebut.

Adapun konsep mengenai *role* (peran) dan status yang dimaksud status adalah suatu posisi atau kedudukan dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak istimewa yang sepadan. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu.¹⁰

Berkaitan dengan peran institusi dalam hal memerangi kemiskinan, bahwa keberadaan institusi yang saling berintegrasi merupakan sebuah peran yang diharapkan dalam pengelolaan zakat. Dimana masing-masing institusi hadir sesuai perannya memberikan kontribusi dan saling melengkapi, menjadi bagian yang teramat penting dalam setiap tahapan proses dalam pencapaian tujuan akhir yang diharapkan.

Kriteria *Mustahiq* dan UMKM

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai saat ini masih terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia untuk menekan dan mengurangi pertumbuhannya. Berbagai upaya setiap tahunnya terus dilakukan pemerintah dibawah koordinasi berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta.

Menurut Tamboto, konsep kemiskinan adalah meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan

keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.¹¹

Untuk itu penerapan standar khusus perlu ditentukan sehingga mempermudah pelaksanaan program. Pertama dengan melihat arti kemiskinan itu sendiri. Sementara itu kemiskinan absolut menurut Todaro merupakan situasi ketidakmampuan atau kemampuan yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok subsistem berupa makanan, pakaian tempat tinggal dan pelayanan kesehatan dasar.⁷

Dari konsep di atas, kita dapat melihat bahwa golongan ini merupakan, orang-orang yang perlu mendapat bantuan, mengingat adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar.

Sementara itu dalam Islam digunakan istilah *mustahiq* sebagai orang yang berhak menerima bantuan melalui zakat. *Mustahiq* secara terminologi (istilah syara') adalah orang yang berhak untuk menerima harta zakat atau orang yang memiliki hak untuk mendapatkan dana zakat. Menurut Syahril Zamil, *mustahiq* adalah orang yang berhak mendapat zakat yakni orang-orang yang tidak mempunyai harta yang memadai untuk memenuhi hajat hidup pribadi dan anggota keluarga.¹² Artinya ada kesamaan konsep antara kemiskinan dan *mustahiq*, yakni orang-orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun kriteria *mustahiq*, tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Disebutkan bahwa terdapat delapan golongan/*ashnaf* orang yang berhak mendapatkan zakat yaitu : orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.

Ada prioritas kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi, menurut Maslow yakni kebutuhan fisiologis diantara salah satu hirarki kebutuhan manusia. Kebutuhan Fisiologis (*physiological needs*) kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur dan oksigen (sandang, pangan, papan). Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya.¹³

Disisi lain menurut pendekatan konsep *the basic needs approach* (pendekatan kebutuhan pokok), teori ini diperkenalkan oleh Baricloche Foundation di Argentina. Menurut kelompok ini, kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika mereka masih berada dibawah garis kemiskinan serta tidak mempunyai pekerjaan untuk mendapatkan yang lebih baik.¹⁴

Untuk mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* ada lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berskala nasional. Lembaga tersebut bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Melalui sebelas program yang dimilikinya BAZNAS menyalurkan zakat para *muzakki*. Kesebelas program itu adalah LAB (Layanan Aktif BAZNAS), BTB (BAZNAS Tanggap Bencana), LBB

(lembaga Beasiswa BAZNAS), SCB (Sekolah Cendekia BAZNAS), RSBI (Rumah Sehat BAZNAS Indonesia), ZCD (Zakat Community Development), BMFi (BAZNAS Mikrofinance), LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*), LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak *Mustahiq*) dan Puskas (Pusat Kajian Strategis).

Di Indonesia ada dua macam pemenuhan kebutuhan yang dilakukan BAZNAS yaitu distribusi zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan bantuan berupa uang tunai atau barang-barang sembako yang bersifat sebagai penghasilan tambahan yang dikonsumsi *mustahiq*. Sementara itu zakat produktif berupa bantuan yang memberikan stimulus kepada *mustahiq* untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dengan berusaha bekerja.

Sebagai acuan penentuan *mustahiq*, digunakan alat ukur standar kemiskinan BPS. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Melalui pendekatan ini, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran rata-rata perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Sehingga, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.²

Salah satu cara untuk membuat *mustahiq* bisa memiliki penghasilan yang memadai maka diarahkan dengan memberdayakan dirinya untuk berusaha sendiri, atau menjadi seorang wirausahawan. Bila memang *mustahiq* ini telah memiliki usaha sendiri namun termasuk pada golongan dibawah garis kemiskinan, maka ini menjadi sasaran lanjutan untuk diberdayakan.

Pemberdayaan *mustahiq* dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Pengertian UMKM Dalam Bab I Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro didefinisikan sebagai: "usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. "

Sementara itu dalam Pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta; Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2,5 miliar.¹⁵

Dalam perspektif usaha, UMKM dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: pertama, UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Kedua, UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. Keempat, *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.¹⁶

Saat ini pemerintah sudah memiliki program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi. Pembiayaan UMi disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMi antara lain: PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.

Tahun 2018, UMi ditargetkan untuk menyentuh 800.000 pelaku usaha mikro yang tidak *bankable*.¹⁷

Program UMi yang sudah digulirkan pemerintah, sebaiknya tidak menjadi sasaran BAZNAS untuk program pemberdayaan inter institusi.

Sasaran BAZNAS dalam memberdayakan UMKM prioritas utamanya adalah UMKM yang masuk pada kriteria UMKM sektor informal yang berada dibawah garis kemiskinan, atau pelaku UMKM yang jatuh pailit. Seperti pendapat yang disampaikan peneliti Jamil, bahwa orang yang berhutang dan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, lalu ia tidak mampu lagi membayar hutangnya itu, seperti pedagang yang jatuh pailit (rugi dalam perdagangannya) dan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia diperbolehkan menerima zakat untuk menutupi hutangnya.¹²

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan sejumlah prasyarat yang terencana, sistematis dan menyeluruh, meliputi : 1) Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya dan menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi, 2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses sumber daya produktif 3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah, 4) Pemberdayaan usaha skala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.¹⁸

Program Kecakapan Hidup Memberdayakan *Mustahiq* melalui UMKM

Dalam upaya pemberdayaan *mustahiq* melalui UMKM, perlunya diberikan pendidikan khusus atau pelatihan sebagai bekal untuk berusaha dan memberikan penghasilan bagi mereka. Menurut Gary Becker dalam *Human Capital Theory* bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan investasi yang paling penting dalam *human capital*.¹⁹

Program pendidikan *life skill* kecakapan hidup sebagai pendekatan atau proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan atau menghasilkan karakteristik yang diinginkan atau keterampilan psiko-sosial yang diperlukan dan relevan dengan konteks tertentu (seperti dalam proses politik, tempat kerja, di rumah atau di masyarakat), dan spesifik sektor atau domain (seperti kesehatan, lingkungan, jenis kelamin, pekerjaan, dll) dalam jangka waktu tertentu.²⁰

Menurut D.E Rumelhart dan Donald A Norman poin utama dari mode pembelajaran adalah bahwa desain pembelajaran dan desain kurikulum harus cocok dengan tiga mode pembelajaran ini: *accretion*, *structuring* dan *tuning*. Akresi mode yang paling umum, adalah proses akuisisi pengetahuan, di mana pengetahuan baru masuk ke dalam memori manusia. *Structuring* (penataan dan penataan ulang), melibatkan penciptaan skema baru atau struktur pengetahuan. *Tuning mode* yang paling memakan waktu, adalah proses mengenai pengetahuan baru dan penggunaannya untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas manusia²¹

Bila melihat definisi dari kurikulum itu sendiri merupakan seperangkat aturan yang harus dilalui oleh murid, pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru untuk mencapai suatu jenjang tertentu (ijazah). Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan, pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan²²

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan; perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus.

Pemberian pelatihan kepada para *mustahiq* memerlukan program khusus yang jelas dan terarah. Untuk itu perlunya melibatkan lembaga lain yang berkaitan erat dengan pemberian pendidikan/pelatihan yang memiliki kurikulum, standar kompetensi dan indikator lulusan yang terukur.

Beberapa program pelatihan untuk meningkatkan *life skill*, sudah banyak di *release* oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal) dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Program Kecakapan Hidup (PKH), Program Kecakapan Wirausaha (PKW), Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU) dan Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU)

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan standar Kompetensi Lulusan dan Kurikulum untuk keterampilan kewirausahaan mengenai mata pelajaran dan alokasi waktu dan bahan

pembelajaran minimal 150 jam @ 60 menit (terdiri dari materi teori dan praktik keterampilan serta praktik kewirausahaan. Jenis keterampilan yang *marketable* dan layak diijadikan usaha mandiri atau kelompok. Pembelajaran program kewirausahaan memerlukan kurikulum dan bahan ajar keterampilan dan kewirausahaan yang mencakup minimum : mempelajari kompetensi keterampilan yang sesuai dengan hasil identifikasi peluang usaha, kewirausahaan (pola pikir, karakter pengusaha, merencanakan & memulai usaha), pemasaran dan pengembangan usaha, pengelolaan produksi/operasional, pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM.

Indikator keberhasilan yang ditetapkan : 1) Minimal 90% dari peserta didik dalam menyelesaikan program pelatihan tuntas, 2) Minimal 75% dari peserta didik yang menyelesaikan pelatihan dapat merintis usaha, 3) Minimal 20% dari peserta didik yang merintis usaha memiliki penghasilan sebesar upah minimum provinsi/ kabupaten/ kota setempat.²³

Penetapan standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang digunakan supaya mendapatkan lulusan yang mampu mandiri dalam berusaha.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang dihasilkan merupakan data deskriptif berupa kalimat yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Alasan menggunakan metode ini selain untuk memahami situasi sosial secara mendalam juga menemukan pola/*prototype* yang sesuai situasi sosial²⁴. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian menggunakan pendekatan literer atau dokumentatif. Sebagai bagian dari penentuan fokus penelitian, dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah lalu atau melalui pendalaman teoritis yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.²⁵. Studi literatur juga merupakan penelitian yang menggunakan literatur sebagai rujukan utama atau sebagai sumber data primer. Adapun sumber literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, dan pencarian melalui internet. Penelitian penulis merupakan penelitian yang menggambarkan tentang *prototype* suatu pengelolaan zakat yang melibatkan dua institusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencari sebuah *prototype* pengelolaan zakat melalui sinergitas inter institusi yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq menjadi salah satu strategi dalam efisiensi dan efektifitas distribusi zakat. Beberapa penelitian menyampaikan hasilnya terutama mengenai pola dan efektifitas distribusi zakat. Seperti yang dikaji Arif Setiawan dkk tentang Rancangan *Prototype* Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif di Jawa Timur, hasilnya menunjukkan: dalam perancangan *prototype* pemberdayaan pelaku Usaha Kecil Menengah berbasis zakat produktif diperlukan sinergitas yang kontinyu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur.²⁶

Kajian yang dilakukan oleh Mulkan Syahriza dkk tentang Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara), menyimpulkan Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada *mustahiq* di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang *mustahiq* secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.²⁷

Kajian Ahmad Nashiruddin Savid tentang Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep pemanfaatan produktif zakat tentang pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Gresik dituangkan ke dalam beberapa program yang membentuk tiga jenis pemanfaatan produktif zakat, yaitu: (1) pemberdayaan rolling ternak baik secara individu maupun kolektif, (2) pemberdayaan modal bergulir, (3) Penyediaan alat kerja. Indikator efektivitas dalam penelitian ini menggunakan teori keefektifan Ni Wayan Budiani dengan empat indikator program, yaitu: ketepatan sasaran program, program sosialisasi, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program telah efektif, sementara dua lainnya belum efektif.²⁸

Kajian Afif, M.; Oktiadi, S. Tentang Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Magelang, serta kekuatan dan kelemahannya. Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa *mustahiq* zakat produktif oleh BAZNAS Magelang rata-rata belum mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat. BAZNAS Magelang dalam pendistribusiannya hanya sekedar memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS Magelang belum melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan terhadap *mustahiq* yang telah menerima bantuan zakat produktif, sehingga BAZNAS Magelang belum dapat dikatakan efektif dalam pendistribusian harta zakat produktifnya.²⁹

Kajian Rina Irawati tentang Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil disimpulkan bahwa Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelatihan dan pembinaan secara simultan dan parsial terhadap pengembangan usaha kecil. Hasilnya membuktikan bahwa ada pengaruh secara simultan dan parsial antara pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil.³⁰

Sampel dalam penelitian ini 125 pelaku usaha kecil yang terdiri dari 45 pelaku usaha kecil batik Pekalongan, 42 usaha kecil makanan khas Batu Malang dan 38 usaha kecil keramik Kasongan Bantul Yogyakarta. Analisis data menggunakan Structural Equation *Prototyping* (SEM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha. Nilai kewirausahaan mempunyai pengaruh langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan juga

berpengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha. Sedangkan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap kemandirian usaha.³¹

Peneliti lain menganalisis pengaruh semangat kewirausahaan dan nilai kewirausahaan pada perilaku kewirausahaan untuk menciptakan kemandirian usaha. Bahwa semangat kewirausahaan memiliki pengaruh positif langsung pada perilaku kewirausahaan dan efek tidak langsung positif pada kemandirian bisnis.³²

Berdasarkan hasil penelitian lain juga bahwa zakat produktif dan zakat konsumtif mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan *mustahiq*. Namun demikian, zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Hal ini disebabkan pemberian zakat produktif oleh amil kepada *mustahiq* selalu diiringi dengan pendampingan usaha yang tidak hanya memberikan informasi mengenai bagaimana cara berbisnis yang baik, tapi juga memberikan bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³³

Secara konseptual, kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) memiliki kedekatan orientasi dengan misi pengelolaan zakat produktif. Sebagaimana halnya zakat, konsep *social entrepreneurship* juga mengedepankan aspek kebersamaan dalam semangat persaudaraan (*ukhuwah*) yang ditunjukkan dengan *social mission (goal)*, juga menekankan aspek kesungguhan bagi para *mustahiq* dalam membangun kemandirian ekonomi (*empowerment*).³⁴

Hasil penelitian Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara bahwa keberadaan Baitul Mal diikat oleh sejumlah peraturan (*Qanun*). Penerapan zakat produktif adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berdasarkan *qard al-hasan* untuk memotivasi usaha dengan baik dan maksimal. Program ini memberi dampak yang signifikan untuk penunjang kemakmuran masyarakat.³⁵

Zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU kota Makassar mampu meningkatkan ekonomi *mustahiq*, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan *mustahiq* tentang ilmu agama.³⁶

Memberdayakan *Mustahiq* Dengan Zakat Konsumtif dan Produktif

Mustahiq merupakan orang yang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya dan berhak menerima bantuan zakat. Untuk menentukan seseorang berkategori *mustahiq* selain rujukan Al-Quran juga perlu menggunakan standar lebih terperinci mengenai *mustahiq*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan *mustahiq* yang tepat sasaran.

Tujuan untuk memberikan bantuan kepada *mustahiq* secara umum adalah mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun secara khusus adalah untuk membantu mereka keluar dari kondisi miskin, karena mereka memiliki hak untuk dapat hidup layak dari hasil distribusi harta para muzakki. Para muzakki wajib membayarkan zakatnya seperti tertuang dalam surat Al Baqarah: 43, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Perintah membayar zakat ini ditulis berulang di dalam Alquran dalam berbagai ayat sebanyak 32 kali.

Membantu *mustahiq* hidup layak bukan hanya tugas pemerintah, namun merupakan tugas umat muslim yang mampu. Jadi tidak ada alasan bagi yang mampu untuk mengabaikan perintah ini. Menjadi keharusan untuk mengarahkan berbagai cara dalam memberikan bantuan yang berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia.

Untuk memberikan bantuan yang terkoordinasi dengan baik, perlu dilakukan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sesuatu pekerjaan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan *output* yang baik pula, seperti yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.³⁷

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan sejumlah prasyarat yang terencana, sistematis dan menyeluruh, meliputi penciptaan iklim usaha pengembangan sistem pendukung dan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif¹⁸. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin

Tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui UMKM terdiri dari atas tahapan seperti berikut ini :

1. Tahap pertama, adalah proses *screening* mengidentifikasi *mustahiq* yang masih bisa diberdayakan serta mengidentifikasi jenis usaha yang sedang ditekuni.
 - a. Mengumpulkan data *mustahiq* berdasarkan data dinas sosial
 - b. Mendata ulang *mustahiq* yang masih bisa diberdayakan melalui pemberian keterampilan, termasuk data usia, jenis kelamin dan pendidikan terakhir yang pernah dijalani. Hasil penelitian menunjukkan bawah karakteristik pekerja sektor informal didominasi oleh pria, usia produktif, pendidikan SMA ke atas, tanggungan 1 orang, jenis usaha kios/warung, jam kerja rata-rata 10 jam, lama kerja >3 tahun, modal ratusan ribu hingga jutaan, dan pendapatan yang masih rendah (<UMK).³⁸
 - c. Mendata jenis usaha *mustahiq* bila mereka telah memiliki usaha sebelumnya (usaha mikro, jenis sektor informal)
2. Tahap kedua, adalah proses distribusi zakat konsumtif
 - a. Besaran bantuan per rumah tangga Rp. 1.990.170
 - b. Diberikan kepada *mustahiq* sampai dinyatakan mampu menjadi wirausahawan mandiri dengan ketentuan lihat pada butir 5.
3. Tahap ketiga, pemberian pelatihan atau *life skill training* dan pendampingan usaha pemberian pelatihan selama 150 jam untuk jenis pelatihan Pendidikan Kecapakan Wirausaha (PKW). Program pendidikan *life skill* kecakapan hidup sebagai pendekatan atau proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan atau menghasilkan keterampilan²⁰.
 - a. Pendampingan usaha setelah program pendidikan selesai. Permasalahan umum yang dihadapi UMKM di Indonesia dalam pengembangan usahanya antara lain adalah: (1) terbatasnya pendanaan untuk pengembangan usaha; (2) kurangnya informasi dan akses

bahan baku dan pasar; (3) rendahnya kualitas sumber daya manusia; (4) rendahnya kemampuan untuk menghasilkan produk yang inovatif; dan (5) lemahnya pendampingan (inkubasi).³⁹

- b. Pemberian referensi layak mendapatkan tambahan modal dari pendamping usaha, melaluiajuan proposal *Break Even Point* (BEP). Menggunakan simulai penghitungan BEP dibawah ini, dengan total *expenditure* berdasarkan data kebutuhan warga miskin (BPS). Angka lain berupa ilustrasi.

No.	Keterangan	Dalam Rupiah (Rp.)
(a)	Total <i>household expenditure</i> /bulan	1.816.667,00
(b)	Toal <i>Average cost</i> /bulan	1.450.000,00
(c)	Total (a+b)	3.266.667,00
(d)	Harga jual per unit	12.500,00
(e)	Biaya bahan baku	2.500,00
(f)	Profit Margin (d-e)	10.000,00
Total Break Even Poin (c/f) _ Unit		326,67
Break Even Point Business (b/f)_ Unit		145,00

Tabel 1. Simulasi perhitungan BEP sebagai dasar pemberian modal⁴⁰

4. Tahap keempat pemberian zakat produktif sebagai modal usaha.
 - a. Pemberian zakat konsumtif masih terus dilakukan, mengingat kemampuan *mustahiq* yang masih berusaha untuk mengejar omset dan belum adanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam upaya menghindari digunakannya modal untuk memenuhi kebutuhan pokok. Seperti yang dilakukan pihak Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program ini, terlebih dahulu membuat *assessment* untuk melihat kebutuhan para *mustahiq* dilanjutkan dengan pembuatan program kerja. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada *mustahiq* secara *qardhul hasan*. Adapun Pengawasan kepada *mustahiq* dilakukan dengan cara pertemuan 1 (satu) bulan sekali terhadap kelompok binaan.³⁶
 - b. Alasan penggunaan zakat sebagai akses modal bagi *mustahiq* yaitu mengingat ada tiga hambatan utama bagi para UMKM dalam menjalankan usahanya :
 - 1) Akses modal , 60-70% UMKM belum mendapat akses pembiayaan perbankan
 - 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 3) Hukum , umumnya UMKM masih belum berbadan hukum
 - 4) Akuntabilitas, belum memiliki sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik¹⁶

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor yang terbukti memengaruhi keberhasilan usaha *mustahiq* adalah usia, lama usaha, laba usaha, dan frekuensi pembiayaan.⁴¹ Penelitian lain memperlihatkan pula bahwa zakat produktif dan zakat konsumtif mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan *mustahiq*. Namun demikian, zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif. Hal ini disebabkan pemberian zakat produktif oleh amil kepada *mustahiq* selalu diiringi dengan pendampingan usaha juga memberikan bagaimana cara beragama yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³³

- c. Pemberian modal berdasarkan referensi dari team pendampingan usaha (Team Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat- Kementrian Pendidikan)
- d. Besaran pemberian akses modal berdasarkan target omset yang dibuat oleh masing-masing *mustahiq*

Sebagai rujukan pemberian besaran modal kepada para wirausahawan, seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri dalam menentukan limit kredit / plafon kredit. Menggunakan rumus 70% dari perputaran penjualan usaha debitor (wirausahawan). Kebijakan tersebut tidak terlepas dari program edukasi yang diberikan kepada debitor (wirausahawan) agar sadar dalam pemenuhan kewajibannya karena ada modal debitor (wirausahawan) sendiri sebesar 30% dan bukan modal kerjanya dibiayai 100% oleh bank. Sisi lain yang menjadi pertimbangan adalah, berdasarkan pertimbangan pada perputaran usaha dan kemampuan membayar calon debitor.⁴² Dengan pola tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran saat mengucurkan bantuan modal pada para wirausahawan yang sudah tereduksi.

- 4) Tahap kelima, monitoring hasil usaha (omset) oleh team BAZNAS
- 5) Tahap keenam, pemutusan/ pemberhentian bantuan zakat konsumtif dan produktif, melalui simulasi penghitungan BEP
- 6) Tahap ketujuh, pendampingan pengumpulan zakat dari para *mustahiq* yang sudah berhasil dalam usahanya.

Kerjasama dengan Dirjen PIAUD dan Pendidikan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Wirausaha *Mustahiq*

Semua aspek dan lembaga terkait harus bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah sebagai legislator dan fasilitator harus secara aktif mengontrol semua aktifitas pemberdayaan zakat ini.⁴³

Hasil penemuan Hussaini menyatakan bahwa hanya pengusaha yang memiliki bekal dan memiliki ketertarikan terhadap wirausaha amat berhubungan dengan pengurangan kemiskinan (*The findings suggest that only entrepreneurship education and attraction dimension of entrepreneurship was significantly related to poverty reduction*).⁴⁴

Dalam Al Quran juga disebutkan pada surat Al Qashas ayat 26 ...” Wahai ayahku, Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai

pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Dalam tafsir Ibnu Katsir, dikemukakan bahwa maksud ayat “*Hai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja,*” yaitu sebagai penggembala kambingnya. Kemudian lanjutan ayat tersebut “*Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,*” maka ayahnya berkata kepadanya: “Apa yang kamu ketahui tentang hal itu?” Wanita itu berkata: “Dia telah mengangkat sebuah batu besar yang tidak mampu diangkat kecuali oleh 10 orang laki-laki. Dan saat aku datang bersamanya, aku berjalan di depannya, lalu ia berkata kepadaku: “Berjalanlah dibelakangku. ‘ Jika ia berbeda jalan denganku, ia memberikan sebuah tanda dengan batu kerikil agar aku mengetahui ke mana ia berjalan.”

Dari tafsir di atas, bahwa sesungguhnya yang paling baik dalam mempekerjakan seseorang adalah orang yang tenaganya kuat dan dapat dipercaya yakni melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga memberikan rasa aman kepada orang yang memberikan kepercayaan. Dari ayat ini memberikan petunjuk dalam memilih *mustahiq* yang amanah dan dapat diberdayakan. Ketika diberikan dana untuk usaha yang dapat dijalankan, maka tidak sepeserpun uang itu dikurangi untuk kepentingan lain, dalam menjaga keberlangsungan program.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu : tingkat umur; besarnya beban tanggungan keluarga; rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, rendahnya tingkat pendapatan, dan sarana produksi yang masih sederhana serta etos kerja yang rendah⁴⁵

Lebih jauh, pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *social entrepreneurship* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.³⁴

Mustahiq yang lebih berpendidikan dan memiliki pekerjaan berpeluang besar menjadi sejahtera, hal ini disebabkan *mustahiq* yang terdidik dan memiliki pekerjaan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mencari dan mendapatkan penghasilan dibandingkan dengan *mustahiq* yang berpendidikan rendah dan tidak bekerja. Para pelaku usaha kecil dan binaan koperasi hendaknya memiliki pengetahuan dasar agar memiliki motivasi jiwa kewirausahaan dan mampu menerapkan cara pengelolaan keuangan secara konsisten⁴⁶

Hal-hal di atas merupakan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian pendidikan/pelatihan yang berkaitan dengan wirausaha dapat mengangkat mereka dari area kemiskinan.

Sesuai dengan teori *role* (peran) dan status yang dimaksud bahwa status adalah suatu posisi atau kedudukan dalam masyarakat dengan kewajiban dan hak istimewa yang sepadan. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu. Perlunya kerjasama dengan lembaga lain yang berkompeten, mengingat lembaga lain dalam hal ini Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat memiliki program jelas, tepat sasaran, memiliki standar kompetensi, memiliki kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan berkaitan dengan kewirausahaan. Disamping memiliki jumlah jam belajar khusus bagi para peserta pelatihan.

Memberikan pendidikan/keterampilan bukanlah ranah BAZNAS, upaya kerjasama merupakan pilihan yang tepat dilakukan dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui pendidikan kewirausahaan yang membentuk UMKM.

Menurut laporan Dirjen PAUDNI dan DIKMAS “jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan kecakapan berwirausaha” ditargetkan sebanyak 112.000 orang. Setelah diukur pencapaiannya, terealisasi sebanyak 112.405 orang, dengan persentase capaian 100,36%.

Pencapaian target ini didukung melalui strategi pelaksanaan program yang dialokasikan dalam APBN dalam bentuk pemberian bantuan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Kerja Unggulan (PKKU), bantuan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Unggulan (PKWU).⁴⁷

Sebagai Indikator keberhasilan program kewirausahaan selain yang ditetapkan oleh Dirjen PAUDNI dan DIKMAS, menurut Sativana yaitu : 1) Meningkatnya jangkauan pasar, 2) Terkendalinya kelancaran arus kas, 3) Meningkatnya jumlah tenaga kerja, 4) Meningkatnya omset dan asset dan 5) Meningkatnya jumlah dan variasi inventori.⁴⁰

Indikator ini diberlakukan setelah *mustahiq* mengikuti pelatihan dan pendampingan usaha. Penerapan indikator ini akan membantu mempermudah mengidentifikasi keberhasilan *mustahiq* dalam berwirausaha juga membantu dibuatnya keputusan pelepasan dana bantuan zakat.

Pendampingan Spiritual Mengubah *Mustahiq* Menjadi Muzakki

Para *mustahiq* yang diberikan bantuan dana zakat konsumtif maupun produktif perlu diberikan pendampingan secara spiritual. Nilai-nilai religius ditanamkan pada mereka terutama yang berkaitan dengan merubah kondisi keadaan masing-masing. Cuplikan ayat al quran bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd:11) perlu diinternalisasi.

Upaya untuk merubah kondisi hidup *mustahiq* menjadi tanggungjawab masing-masing yang difasilitasi oleh BAZNAS. Keberhasilan merubah kondisi hidup tidak hanya melalui keberhasilan pencapaian materi namun juga keberhasilan dalam membantu orang lain manakala usahanya telah berhasil. Peran pendampingan spiritual menjadi motivasi untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan di atas. Adanya tanggungjawab dari para *mustahiq* untuk mengembalikan modal usaha dalam bentuk zakat penghasilan.

Sebuah penelitian menyebutkan pendidikan agama yang diberikan amil berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran beragama *mustahiq*, dan hal ini berperan penting dalam mengeluarkan *mustahiq* dari kemiskinan spiritual³³.

Diagram 1. *Prototype* Distribusi Zakat Inter Institusi

SIMPULAN

Dari hasil kajian literatur di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa *prototype* manajemen zakat yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* menurut peneliti adalah :

1) Sebuah *prototype* manajemen zakat yang bersinergi, melibatkan institusi lain dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui UMKM. Langkah-langkah yang integratif dan komprehensif dalam aplikasi *prototype* tersebut yakni dengan melakukan *screening*, *training*, *business assistance* dan *monitoring*. Keempat aspek itu dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan serta dalam koridor sinergitas antara BAZNAS dan Dirjen PAUDNI dan DIKMAS dengan tidak mengabaikan kebutuhan pokok dan kebutuhan modal usaha.

2) Hasil dari *prototype* manajemen zakat tersebut dapat membentuk seorang *mustahiq* yang dapat diberdayakan melalui UMKM, dengan melalui proses pada poin satu sehingga terwujud *mustahiq* yang mandiri serta berubah peran menjadi seorang *muzakki*.

ENDNOTES

- (1) Rafiqi, Y. Implikasi Amandemen Undang-Undang Tentang Zakat Terhadap Optimalisasi Pengumpulan Dan Pemberdayaan Zakat. . *Jurnal Ekonomi Syariah* **2016**, 1 (1), 14.
- (2) Badan Pusat Statistik. *Penduduk Miskin*; <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- (3) Administrator. <https://www.sdg2030indonesia.org/> <https://www.sdg2030indonesia.org/> (accessed Oct 27, 2020).
- (4) Al Arif, M. N. R. Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan di Propinsi DKI Jakarta. *Al-Iqtishad* **2015**, 4 (1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2079>.
- (5) Fitri, M. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica* **2017**, 8 (1), 149. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- (6) Wulansari, S. D.; Setiawan, A. H. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerima Zakat). **2014**, 3, 15.
- (7) Fitriani, W. F.; Priantina, A. Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *JAM* **2016**, 4 (2), 142–150. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.142-150>.
- (8) Qardawi, Y. *Hukum Zakat*; Litera AntarNusa.: Jakarta, 2007.
- (9) Ritzer, G.; J. Goodman, D. *Teori Sosiologi Modern*, 6th ed.; Kencana, 2004.
- (10) Linton, R. *The Study Of Man and Introduction*; New York : Appleton Century Crofts, Inc., 1936.
- (11) J.D. Tamboto, H.; A.CH. Manongko, A. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Pertama.*; CV Seribu Bintang, 2019.
- (12) Jamil, S. Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 15.
- (13) G. Goble, F. *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Terjemahan dari The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow, New York.; Kanisius, 1987.
- (14) Saiful; Suwarno. Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis* **2015**, Volume 19, Nomor 2.
- (15) Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- (16) Bank Indonesia (BI); Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*; Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015.
- (17) UMi <https://www.kemenkeu.go.id/umi> (accessed Oct 28, 2020).
- (18) Fitriati, R. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- (19) S. Becker, G. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd ed.; The University of Chicago Press, 1993.
- (20) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. *Regional Handbook on Life Skills Programmes for Non-Formal Education*; Unesco Bangkok, 2012.
- (21) C. Leonard, D. *Learning Theories A to Z*; Greenwood Press, 2002.
- (22) Ahid, N. Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. *jisl* **2014**, 1 (1), 12. <https://doi.org/10.15642/islamika.2006.1.1.12-29>.
- (23) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Wirausaha* 2019.
- (24) Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 25th ed.; CV Alfabeta: Bandung, 2017.
- (25) Ahmad Saebani, B. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Disertasi*; Pustaka Setia Bandung, 2017.
- (26) Setiawan, A.; Wisadirana, D.; Mu'adi, S. Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana* **2015**, 18 (04), 247–258. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.5>.
- (27) Riza, M. S. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AJEI* **2019**, 4 (1), 137. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090>.

- (28) Savid, A. N. Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. *JES* **2017**, 2 (1), 90. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i1.4361>.
- (29) Afif, M.; Oktiadi, S. Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *IEJ* **2018**, 4 (2), 133. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>.
- (30) Irawati, R. PENGARUH PELATIHAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL. *JBK* **2018**, 12 (1), 74–84. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18>.
- (31) Sukirman, S. Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha melalui Perilaku Kewirausahaan. *jeb* **2017**, 20 (1), 117. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.318>.
- (32) Hendarwan, D.; Darma, U. B. Menumbuhkan Jiwa, Perilaku dan Nilai Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bisnis. **2018**, 17 (2), 10.
- (33) Ali, K. M.; Amalia, N. N.; El Ayyubi, S. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *JAM* **2016**, 4 (1), 19–32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>.
- (34) Efendi, M. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. **2017**, 2, 18.
- (35) Nasrullah, N. REGULASI ZAKAT DAN PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFSL3* **2015**, 7 (1), 1. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v9i1.1-24>.
- (36) Hidajat, R. Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. **2017**, No. 1, 22.
- (37) Hafidhuddin, D.; Tanjung, H. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani, 2003.
- (38) Paderi, G. T.; Mulyani, R. R. Karakteristik Dan Analisis Pendapatan Pekerja Sektor Informal Di Sekitar Pasar Kembang, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia* **2018**, 7 (3).
- (39) Hasbullah, R.; Surahman, M.; Yani, A.; Almada, D. P.; Faizaty, E. N. Model Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. **19**, 7.
- (40) Team Koperasi Syariah BMT ItQan. Standar Operating Procedur Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ItQan Bandung. April 2007.
- (41) Muhammad, H.; Lubis, D.; Hakim, D. B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif di LAZ An-Nuur. *JAM* **2018**, 6 (1), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.1-14>.
- (42) Katili, I. M. KELAYAKAN KREDIT DAN PENETAPAN PLAFON KREDIT MODAL KERJA CALON DEBITOR UMKM DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG DOTULOLONG LASUT MANADO. **2014**, 10.
- (43) Chaniago, S. A. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *jhi* **2015**, 13 (1), 47. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.
- (44) Hussaini, U.; Noma, I. A. Entrepreneurship as a Viable Tool for Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Commerce and Management Research* **2019**, 9.
- (45) Sartika, C.; Balaka, M. Y. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. **13**.
- (46) Susita, D.; Mardiyati, U.; Aminah, H. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Binaan Koperasi Di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cipinang Besar Selatan. *jpm* **2017**, 1 (1), 58–72. <https://doi.org/10.21009/JPM.001.1.05>.
- (47) Direktorat Jenderal PAUDNI dan DIKMAS. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PAUDNI Dan DIKMAS*; 2018.
- (48) Sativana, P. D.; Tripalupi, L. E. Tingkat Keberhasilan Program Mahasiswa Wirausaha (pmw) Di Undiksha Ditinjau Dari Aspek Unit Bisnis Tahun. **2014**, 4 (1), 11.

REFERENSI

- Administrator. <https://www.sdg2030indonesia.org/> <https://www.sdg2030indonesia.org/> (accessed Oct 27, 2020).
- Afif, M.; Oktiadi, S. Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *IEJ* **2018**, 4 (2), 133. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>.
- Ahid, N. Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. *jisl* **2014**, 1 (1), 12. <https://doi.org/10.15642/islamica.2006.1.1.12-29>.
- Ahmad Saebani, B. *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis Dan Disertasi*; Pustaka Setia Bandung, 2017.
- Al Arif, M. N. R. Efek Multiplier Zakat Terhadap Pendapatan di Propinsi DKI Jakarta. *Al-Iqtishad* **2015**, 4 (1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2079>.
- Ali, K. M.; Amalia, N. N.; El Ayyubi, S. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *JAM* **2016**, 4 (1), 19–32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>.
- Badan Pusat Statistik. *Penduduk Miskin*; <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Bank Indonesia (BI); Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*; Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015.
- C. Leonard, D. *Learning Theories A to Z*; Greenwood Press, 2002.
- Chaniago, S. A. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *jhi* **2015**, 13 (1), 47. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.
- Direktorat Jenderal PAUDNI dan DIKMAS. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal PAUDNI Dan DIKMAS*; 2018.
- Efendi, M. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. **2017**, 2, 18.
- Fitri, M. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica* **2017**, 8 (1), 149. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>.
- Fitriani, W. F.; Priantina, A. Analisis Penguraian Masalah pada Program Zakat Produktif. *JAM* **2016**, 4 (2), 142–150. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.142-150>.
- Fitriati, R. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah Riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- G. Goble, F. *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, Terjemahan dari The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow, New York.; Kanisius, 1987.
- Hafidhuddin, D.; Tanjung, H. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*; Gema Insani, 2003.
- Hasbullah, R.; Surahman, M.; Yani, A.; Almada, D. P.; Faizaty, E. N. *Prototype Pendampingan UMKM Pangan Melalui Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi*. 19, 7.
- Hendarwan, D.; Darma, U. B. Menumbuhkan Jiwa, Perilaku dan Nilai Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bisnis. **2018**, 17 (2), 10.
- Hidajat, R. Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. **2017**, No. 1, 22.
- Hussaini, U.; Noma, I. A. Entrepreneurship as a Viable Tool for Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Commerce and Management Research* **2019**, 9.
- Irawati, R. PENGARUH PELATIHAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA KECIL. *JBK* **2018**, 12 (1), 74–84. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18>.
- Jamil, S. Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 15.
- J.D. Tamboto, H.; A.CH. Manongko, A. *Prototype Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir, Pertama*; CV Seribu Bintang, 2019.
- Katili, I. M. KELAYAKAN KREDIT DAN PENETAPAN PLAFON KREDIT MODAL KERJA CALON DEBITOR UMKM DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG DOTULOLONG LASUT MANADO. **2014**, 10.
- Linton, R. *The Study Od Man and Introduction*; New York : Appleton Century Crofts, Inc., 1936.
- Muhammad, H.; Lubis, D.; Hakim, D. B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif di LAZ An-Nuur. *JAM* **2018**, 6 (1), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.1-14>.

- Nasrullah, N. REGULASI ZAKAT DAN PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFSL3* **2015**, 7 (1), 1. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v9i1.1-24>.
- Paderi, G. T.; Mulyani, R. R. Karakteristik Dan Analisis Pendapatan Pekerja Sektor Informal Di Sekitar Pasar Kembang, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia* **2018**, 7 (3).
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Wirausaha 2019*.
- Qardawi, Y. *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa.: Jakarta, 2007.
- Rafiqi, Y. Implikasi Amandemen Undang-Undang Tentang Zakat Terhadap Optimalisasi Pengumpulan dan Pemberdayaan Zakat, *Jurnal Ekonomi Syariah*, **2016**, 1 (1), 33.
- Ritzer, G.; J. Goodman, D. *Teori Sosiologi Modern*, 6th ed.; Kencana, 2004.
- Riza, M. S. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *AJEI* **2019**, 4 (1), 137. <https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4090>.
- S. Becker, G. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd ed.; The University of Chicago Press, 1993.
- Saiful; Suwarno. Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik. *BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis* **2015**, Volume 19, Nomor 2.
- Sartika, C.; Balaka, M. Y. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. 13.
- Savid, A. N. Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. *JES* **2017**, 2 (1), 90. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i1.4361>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 25th ed.; CV Alfabeta: Bandung, 2017.
- Setiawan, A.; Wisadirana, D.; Mu'adi, S. Rancangan *Prototype* Pemberdayaan Pelaku UKM Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi Kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya). *Wacana* **2015**, 18 (04), 247–258. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.04.5>.
- Sukirman, S. Jiwa Kewirausahaan dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha melalui Perilaku Kewirausahaan. *jeb* **2017**, 20 (1), 117. <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.318>.
- Susita, D.; Mardiyati, U.; Aminah, H. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Dan Binaan Koperasi Di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Cipinang Besar Selatan. *jpm* **2017**, 1 (1), 58–72. <https://doi.org/10.21009/JPM.001.1.05>.
- Team Koperasi Syariah BMT ItQan. Standar Operating Procedur Koperasi Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) ItQan Bandung. April 2007.
- UMi <https://www.kemenkeu.go.id/umi> (accessed Oct 28, 2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. *Regional Handbook on Life Skills Programmes for Non-Formal Education*; Unesco Bangkok, 2012.
- Wulansari, S. D.; Setiawan, A. H. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (penerima Zakat). 2014, 3, 15.